BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat ke empat di dunia, selama 40 tahun berturut-turut dan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki jumlah populasi 273,523,615 jiwa. Data yang menunjukkan jumlah populasi di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Negara Republik Indonesia
Berdasarkan Usia
Tahun 2018

Usia	Pria	%	Perempuan	%	Total Populasi Usia	Kelompok Umur Total Populasi
0 – 14	36,313,890	51.19	34,627,215	48,81	70,941,105	25.94
15 – 24	23,633,814	51.41	22,337,802	48.59	45,971,616	16.81
25 – 54	58,256,119	50.27	57,630,366	49.73	115,886,485	42.37
55 – 64	11,689,546	49.54	11,905,417	50.46	23,594,963	8.63
65+	7,824,492	45.68	9,304,960	54.32	17,129,452	6.26

Sumber : worldometers, 2020, data diolah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah populasi terbanyak berada pada usia produktif (15 – 64) dan berjumlah 185.453.064 jiwa, dengan usia rata-rata di Indonesia adalah 29,7 tahun (worldometers, 2020). Dengan begitu, usia tersebut tergolong dalam angkatan kerja. Sehingga, dapat menjadi sasaran subjek pajak, terutama pajak penghasilan yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia.

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan termasuk didalamnya Bentuk Usaha Tetap (Herry Purwono, 2010) Salah satu pajak yang berpotensi menghasilkan penerimaan yang besar bagi negara, dilihat dari besarnya jumlah penduduk di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan, dianggap paling tepat. Dalam 5 tahun terakhir, periode 2015 – 2019 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan.

Peningkatan bisa terlihat dari penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak dan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh).

Menurut Mardiasmo (2016:9) kenaikan pajak tetap harus sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan Wajib Pajak amat sangat penting bagi penerimaan pajak negeri yang tentunya berpengaruh pada APBN. Hal ini dapat dibantu dengan sistem pemungutan pajak penghasilan yang dapat memudahkan Wajib Pajak, yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan ciri-ciri :

- Wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Namun dalam kenyataannya tetap saja terjadi tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Tunggakan tersebut berakibat adanya utang pajak sekaligus denda yang harus dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo. Akibat dari hal itu Direktorat Jendral Pajak melalui fiskus harus melakukan penagihan pajak. Sehingga, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru untuk meningkatkan penerimaan negara. Surat Edaran No SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Compliance Risk Management (CRM) secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sistematis dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan. Selaras dengan dikeluarkannya surat edaran oleh DJP, bukti nyatanya pada tahun 2019 dengan melakukan penagihan pajak, pemerintah dapat meraup Rp 133 Triliun untuk penerimaan pajak negara.

Penagihan pajak itu sendiri menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Alasan penagihan pajak sendiri adalah utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan. Dan yang menjadi dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat 1 UU KUP Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak dimulai dari dasar penagihan pajak yang sudah jatuh tempo kemudian dilanjutkan dengan menegur, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Agus Suharsono, 2014:176) . Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pencairan tunggakan pajak untuk dapat mengoptimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan terhadap tunggakan yang terjadi.

Untuk mengatasi tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan itu dengan cara menerbitkan Penagihan dengan Surat Paksa. Beredarnya Surat Paksa Pajak dan target penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah dengan realisasi atau pencairan tunggakan penerimaan pajak masih tidak sesuai. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686). Surat Paksa pajak diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (Mardiasmo, 2016:153). Surat Paksa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2009 – 2018
pada KPP Pratama Tasikmalaya

Tahun	Total Penerimaan Pajak Penghasilan
2009	Rp709.019.452
2010	Rp829.347.403
2011	Rp915.696.937
2012	Rp1.061.452.088
2013	Rp1.365.587.674
2014	Rp1.595.644.027
2015	Rp1.328.333.030
2016	Rp1.983.226.155
2017	Rp1.582.806.997
2018	Rp1.171.367.299

Sumber : KPP Pratama Tasikmalaya periode 2009– 2018

Terjadinya fluktuasi penerimaan pajak tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Terkait dengan permasalahan tersebut membuktikan adanya masalah yang dihadapi oleh KPP Pratama dalam hal penerimaan pajak. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor

diantaranya adalah permasalahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau permasalahan dari wajib pajak atau pun mungkin masalah dari pihak lain.

Dengan adanya data dan penjelasan tentang penerimaan pajak yang cenderung meningkat, namun masih adanya Penagihan Pajak dan penerbitan Surat Paksa Pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut di KPP Pratama yang ada di Kota Tasikmalaya.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menyajikan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan, sebagai berikut :

1. Nizar Rachman (2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah Sedang/Cukup dan kontribusi pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak adalah tinggi.
2. Kasyful Anwar, Fatimah dan Ayu Oktaviani (2019) mengenai Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak cukup efektif terhadap penerimaan, sedangkan Penagihan dengan Surat Paksa menunjukkan indicator yang kurang efektif.
3. Arfaningsih Muhammad Dan Sunarto (2018) mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak periode 2012-2015.
4. Olvi Madjid dan Lintje Kalangi (2015) mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang. Sedangkan, penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2014 tergolong efektif.

5. Indira Mohammad, David P.E.Saerang dan Sonny Pangerapan (2017) mengenai Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
6. Nanik Fitriani (2013) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil uji signifikansi simultan (uji f) menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
7. Sri Amanah, Popi Fauziati dan Daniati Putri (2018) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kpppratama bukittinggi periode 2014-2016.
8. Wildaniashri (2015) mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Tahun Anggaran 2009-2013). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara parsial pemeriksaan pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. surat paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

9. Yohanes Diaken Nainggolan (2015) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan surat paksa menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, serta besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.
10. Imas Septiyani Hanifah dan R. Ery Wibowo Agung S (2013) mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Batang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 – 2012 dan kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 - 2012.
11. Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) mengenai Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.
12. Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016) mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Balikpapan di tahun 2012 – 2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak karena pada tahun 2012 – 2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%. Hal ini disebabkan karena kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak, surat teguran yang dikirim Kantor Pajak tidak sampai kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan ekonomi.

13. Fahmi Rosyidi (2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil Djp Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak dengan surat teguran secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan surat paksa yang diterbitkan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib, bahkan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibanding penerbitan surat teguran.
14. Darlini, Mahmud Nuhung, Abd Salam (2019) mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria > 100% dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%.
15. Pandapotan Ritonga (2012) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -5,4 % dan penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi.

16. Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.
17. Rani Febrina (2017) mengenai Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Dan Pengumuman Lelang Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh, surat paksa berpengaruh, surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh dan pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggal pajak.
18. Putih Rahmawati, Kusnadi, Hardini Ariningrum (2016) mengenai Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Kedaton Di Bandar Lampung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.
19. Bonifasius H. Tambunan (2016) mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp) Medan Petisah). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah lembar penerbitan surat paksa atau dari jumlah nominalnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
20. Satria Pamber (2016) mengenai Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak dan

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.

Tabel 1.3

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Simpulan	Sumber
1	Nizar Rachman (2014)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak	Variabel: Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Kontribusi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah Sedang/Cukup dan kontribusi pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak adalah tinggi.	Jurnal Universitas Komputer Indonesia. <i>E-Jurnal UNIKOM</i> . Vol. 2, No. 1. Tahun 2014
2	Kasyful Anwar, Fatimah dan Ayu Oktaviani (2019)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel: Pemeriksaan, Penerimaan PPN, dan Tempat Penelitian	Hasilnya adalah Efektivitas Pemeriksaan pajak cukup efektif terhadap penerimaan, sedangkan Penagihan dengan Surat Paksa menunjukkan indicator yang kurang efektif.	Jurnal Universitas Lambung Mangkurat. <i>E-Jurnal Universitas Lambung Mangkurat</i> . Vol. 4, No. 2. Tahun 2019
3	Arfaningsih Muhammad dan Sunarto (2018)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak	Variabel: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015.	Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. <i>E-Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa</i> . Vol. 2, No.1. Tahun 2018
4	Olvi Madjid dan Lintje Kalangi (2015)	Variabel Penelitian: Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel: Surat Teguran dan Tempat Penelitian	Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bitung berdasarkan pengujian dengan formula rasio penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong sangat kurang. Sedangkan, penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2014 tergolong efektif.	Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado. <i>E-Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado</i> . Vol. 3, No. 4. Tahun 2015
5	Indira Mohammad , David	Variabel Penelitian : Penagihan	Variabel : Pemeriksaan, Penerimaan	Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan	Jurnal Universitas Sam

	P.E.Saerang dan Sonny Pangerapan (2017)	Pajak	Pajak dan Tempat Penelitian	terhadap Penerimaan Pajak	Ratulangi. <i>E-Jurnal</i> Universitas Sam Ratulangi. Vol. 12, No. 2. Tahun 2017
6	Nanik Fitriani (2013)	Variabel Penelitian : Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variable : Jumlah Wajib Terdaftar dan Tempat Penelitian	: Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Terdaftar mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan sedangkan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan penerbitan surat paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.	Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. <i>E-Jurnal</i> Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 1, No. 2. Tahun 2013
7	Sri Amanah, Popi Fauziati dan Daniati Putri (2018)	Variable Penelitian : Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel : Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Pemberitahuan dan Tempat Penelitian	: Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi periode 2014-2016.	Jurnal Universitas Bung Hatta. <i>E-Jurnal</i> Universitas Bung Hatta. Vol. 2, No. 1. Tahun 2018
8.	Wildaniashri (2015)	Variabel Penelitian : Surat Paksa Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel : Pemeriksaan Pajak dan Tempat Penelitian	: Pengujian secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. surat paksa berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.	Jurnal Universitas Telkom. <i>E-Jurnal</i> Universitas Telkom. Vol. 2, No. 1. Tahun 2015
9.	Yohanes Diaken Nainggolan (2015)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Surat Teguran, Pencairan Tunggakan Pajak dan Tempat Penelitian	: Surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan surat paksa menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, serta besarnya pengaruh	Jurnal Universitas Riau. <i>E-Jurnal</i> Universitas Riau. Vol. 2, No. 2. Tahun 2015

				surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.	
10.	Imas Septiyani Hanifah dan R. Ery Wibowo Agung S (2013)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan PPH pasal 25/29 dan Tempat Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 – 2012 dan kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008 - 2012.	Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang. E- Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 3, No. 1. Tahun 2013
11.	Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, dan tempat Penelitian	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.	Jurnal Universitas Syiah Kuala. E- Jurnal Universitas Syiah Kuala. Vol. 2, No. 4. Tahun 2017
12.	Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Surat Teguran, Penerimaan pajak, dan Tempat Penelitian	Kontribusi penagihan pajak surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan di tahun 2012 – 2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan tunggakan pajak karena pada tahun 2012 – 2015 kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berada diposisi diatas 10%. Hal ini disebabkan karena kelalaian Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak, surat teguran yang dikirim Kantor Pajak tidak sampai kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan ekonomi.	Jurnal Universitas Mulawarman. E- Jurnal Universitas Mulawarman. Vol. 13, No. 1. Tahun 2016
13.	Fahmi Rosyidi	Variabel Penelitian :	Variabel : Surat	Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran secara	Jurnal Universitas

(2014)	Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Teguran, Kepatuhan Wajib Pajak dan Tempat Penelitian	individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan surat paksa yang diterbitkan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib, bahkan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibanding penerbitan surat teguran.	Islam Sultan Agung. <i>E-Jurnal</i> Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 3, No. 1. Tahun 2014	
14.	Darlini, Mahmud Nuhung, Abd Salam (2019)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria > 100% dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%	Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar. <i>E- Jurnal</i> Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol. 1, No. 2. Tahun 2019
15.	Pandapotan Ritonga (2012)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak dan Tempat Penelitian	Konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar - 5,4 % dan penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi.	Jurnal STMIK Triguna Dharma. <i>E- Jurnal</i> STMIK Triguna Dharma. Vol. 11, No. 3. Tahun 2012
16.	Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Variabel : Pajak Penghasilan Badan dan Tempat Penelitian	Penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.	Jurnal Universitas Gunadarma. <i>E- Jurnal</i> Universitas Gunadarma. Vol. 2, No. 13. Tahun 2008
17.	Rani Febrina (2017)	Variabel Penelitian : Surat Paksa	Variabel : Surat Teguran, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Tunggakan Pajak dan Tempat	Surat teguran tidak berpengaruh, surat paksa berpengaruh, surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh dan pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.	Jurnal Universitas Riau. <i>E- Jurnal</i> Universitas Riau. Vol. 4, No. 2. Tahun 2017

		Penelitian			
18.	Putih Rahmawati, Kusnadi, Hardini Ariningrum (2016)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Kepatuhan, pemeriksaan, Pajak Penghasilaj Pasal 21 dan Tempat Penelitian	Kepatuhan, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 badan pada KPP Pratama Kedaton.	Jurnal Universitas Malahayati. <i>E- Jurnal</i> Universitas Malahayati. Vol. 5, No. 2. Tahun 2016
19.	Bonifasius H. Tambunan (2016)	Variabel Penelitian : Surat Paksa Pajak	Variabel : Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21, Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah lembar penerbitan surat paksa atau dari jumlah nominalnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.	Jurnal Universitas HKBP Nommensen. <i>E- Jurnal</i> Universitas HKBP Nommensen. Vol. 2, No. 2. Tahun 2016
20.	Satria Pamber (2016)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak	Variabel : Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak dan Tempat Penelitian	Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak dan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.	Jurnal Universitas Pasir Pengaraian Rokanhulu. <i>E- Jurnal</i> Universitas Pasir Pengaraian Rokanhulu. Vol. 1, No. 1. Tahun 2016
21.	Hantoro Arief Gisijanto dan Zakiah M. Syahab (2008)	Variabel Penelitian : Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsialberpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.	Jurnal Universitas Gunadarma. <i>E-Jurnal</i> Universitas Gunadarma. Vol. 13, No. 2. Tahun 2008

Luthfi Yazid (2021)

Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2009 – 2018 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya)

Variabel yang digunakan : Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai variabel dependen.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan, maka penulis merumuskan masalah dan lingkup permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2009 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak secara parsial dan simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2009 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2009 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak secara parsial dan simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2009 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan.

2. Kegunaan Bagi Kantor Pajak

Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerjanya selama ini sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan menjadi masukan dalam upaya penurunan Penagihan Pajak dan penurunan peredaran Surat Paksa Pajak, tetapi dapat meningkatkan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan.

3.Kegunaan Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan informasi mengenai Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang berada di KPP Pratama Tasikmalaya beralamat Jl. Sutisna Senjaya No.154, Cikalang, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46114. Tempat ini dipilih karena, baik data maupun informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat dipercaya dan relevan dengan pokok pembahasan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan oleh penulis terhitung mulai bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021.